

Peran Kampus dalam Membentuk Generasi Berintegritas dan Anti Korupsi

ABSTRACT

This study explores the strategic role of universities in fostering integrity and anti-corruption awareness among students through a literature review method. Corruption remains a critical issue that not only causes financial losses but also undermines public trust in national institutions. As centers of higher learning, universities are essential in shaping moral and ethical foundations by embedding honesty, responsibility, and transparency across academic and non-academic programs. The findings indicate that the university's role in preventing corruption can be strengthened through character-based curricula, the implementation of transparent governance systems, and the exemplary conduct of lecturers and staff. A clean and accountable academic environment encourages students to internalize anti-corruption values in daily life. Consistently applied, these efforts will help universities produce future generations who are not only academically competent but also committed to realizing an integrity-driven society free from corruption.

Keyword: University, Integrity, Anti-Corruption, Character Education, Students

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah peran strategis perguruan tinggi dalam menumbuhkan integritas dan kesadaran antikorupsi pada mahasiswa melalui metode studi pustaka. Korupsi masih menjadi persoalan krusial yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Sebagai pusat pembelajaran tinggi, perguruan tinggi berperan penting dalam membentuk fondasi moral dan etika melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, serta transparansi dalam kegiatan akademik dan nonakademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran kampus dalam pencegahan korupsi dapat diperkuat melalui kurikulum berbasis karakter, penerapan tata kelola yang transparan, serta keteladanan dosen dan tenaga pendidik. Lingkungan akademik yang bersih dan akuntabel mendorong mahasiswa untuk menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Jika diterapkan secara konsisten, upaya ini akan membantu perguruan tinggi melahirkan generasi penerus yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkomitmen membangun masyarakat berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

Kata Kunci: Kampus, Integritas, Antikorupsi, Pendidikan Karakter, Mahasiswa

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan serius yang hingga kini masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian material yang besar bagi negara, tetapi juga menciptakan dampak sistemik terhadap kualitas pelayanan publik dan legitimasi pemerintahan. Menurut *Transparency International* (2023), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih stagnan pada skor 34 dari 100, menandakan lemahnya reformasi tata kelola publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman multidimensional terhadap keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Secara sosiologis korupsi dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan moral yang terjadi akibat lemahnya sistem nilai dalam masyarakat (Pope, 2022). Fenomena ini tumbuh subur di tengah budaya permisif yang menganggap korupsi sebagai “hal biasa”. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi tidak cukup melalui penegakan hukum semata.

Zainudin Hasan dan Daniel Junesco (2024) menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan langkah represif yang bersifat kuratif, bukan preventif. Artinya, meskipun tindakan hukum penting untuk memberikan efek jera, strategi pencegahan harus lebih diutamakan melalui pendidikan nilai dan pembentukan karakter. Kesuma et al. (2025) juga menambahkan bahwa pencegahan efektif hanya akan berhasil jika dimulai dari pembiasaan etika dan moral di lingkungan pendidikan.

Dalam kerangka itu pendidikan menjadi alat transformasi sosial yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini (Tilaar, 2011). Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran moral kolektif yang berakar pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Oleh karena itu, sistem pendidikan berperan sebagai benteng awal dalam membangun budaya integritas di masyarakat.

Pendidikan antikorupsi merupakan inovasi dalam sistem pendidikan nasional yang menempatkan integritas sebagai kompetensi dasar (Suyanto, 2020). Upaya ini bukan sekadar menambahkan materi baru dalam kurikulum, tetapi membangun paradigma pendidikan yang berorientasi karakter. Dengan cara ini, siswa dan mahasiswa tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran etik untuk menolak perilaku koruptif.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023) mencatat bahwa penerapan pendidikan karakter melalui program *Merdeka Belajar* menjadi instrumen penting dalam pembentukan budaya integritas di perguruan tinggi. Namun, implementasinya masih bersifat konseptual dan belum terintegrasi dalam seluruh aspek akademik. Oleh karena itu, diperlukan model penguatan nilai antikorupsi yang lebih sistematis di level universitas.

Dalam konteks perguruan tinggi, kampus memiliki posisi unik sebagai inkubator moral dan intelektual generasi muda. Melalui aktivitas akademik dan non-akademik, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis sekaligus bertindak etis. Yusar (2024) menekankan bahwa kurikulum berbasis integritas dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa.

Selain kurikulum organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial menjadi ruang praksis bagi pembentukan nilai-nilai etika publik (Hertanti, 2024). Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat mendorong internalisasi tanggung jawab sosial dan kejujuran. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan karakter tidak berhenti pada kelas, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan kampus yang partisipatif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada keteladanan dosen dan pimpinan institusi (Samion & Thomas, 2024). Dosen berperan sebagai figur moral yang mempengaruhi perilaku mahasiswa secara langsung melalui interaksi akademik. Dengan demikian, konsistensi sikap dan perilaku dosen menjadi kunci keberhasilan transformasi nilai antikorupsi di lingkungan kampus.

Dalam kajian manajemen pendidikan, integritas organisasi akademik tidak dapat dilepaskan dari tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel (Dwiyanto, 2021). Sistem yang bebas konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan akan menciptakan iklim belajar yang bersih. Akibatnya, nilai-nilai kejujuran dapat tumbuh bukan karena instruksi, tetapi karena keteladanan struktural.

Selain itu pendekatan literasi digital juga perlu dikaitkan dengan pendidikan integritas (Putra & Windah, 2021). Di era disrupsi teknologi, kampus memiliki tanggung jawab dalam membentuk kecakapan etika digital agar mahasiswa tidak hanya melek informasi, tetapi juga kritis terhadap penyimpangan di ruang siber. Integritas digital menjadi bentuk baru dari moralitas publik yang relevan dengan generasi milenial.

Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa universitas yang berhasil membangun budaya integritas memiliki korelasi kuat dengan rendahnya tingkat kecurangan akademik (Crittenden & Hanna, 2019). Hal ini membuktikan bahwa budaya etis di kampus dapat menjadi dasar bagi perilaku antikorupsi di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak sekadar normatif, tetapi memiliki efek sosial yang nyata.

Berdasarkan *state of the art* penelitian terdahulu, kajian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa pendekatan integratif antara pendidikan karakter, tata kelola kampus, dan etika digital sebagai tiga pilar utama pembentukan generasi berintegritas. Pendekatan ini memperluas model pendidikan antikorupsi yang sebelumnya lebih berfokus pada aspek kognitif. Dengan menggabungkan dimensi moral, struktural, dan digital, penelitian ini berupaya menghadirkan paradigma holistik dalam pendidikan antikorupsi di Indonesia.

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam peran perguruan tinggi dalam membentuk generasi berintegritas dan antikorupsi. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang pendidikan karakter dan tata kelola kampus yang berintegritas. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan model pendidikan tinggi yang mananamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) karena fokus utamanya adalah menelaah konsep, teori, serta temuan empiris yang relevan dengan peran kampus dalam membentuk generasi berintegritas dan antikorupsi. Menurut Zed (2014), studi pustaka merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada penelusuran data dari sumber-sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (*research gap*) dan mengembangkan argumentasi konseptual yang

lebih komprehensif. Dengan demikian, metode ini dianggap paling sesuai untuk menguraikan fenomena sosial-etik yang membutuhkan pembacaan kritis terhadap literatur ilmiah.

Pemilihan metode studi pustaka juga didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat konseptual, bukan pengumpulan data lapangan (Creswell, 2014). Kajian ini mengandalkan sumber data sekunder seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan. Melalui analisis terhadap sumber-sumber tersebut, penelitian ini berupaya menemukan pola konseptual tentang bagaimana pendidikan tinggi membentuk kesadaran antikorupsi di kalangan mahasiswa. Adapun alur jalannya metode ini dapat dijelaskan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur

Proses pengumpulan data dilakukan melalui lima tahap utama, yaitu: identifikasi masalah, pengumpulan literatur, seleksi data, analisis isi, dan sintesis hasil. Setiap tahap dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan relevansi, kredibilitas, dan validitas sumber (Booth, Colomb, & Williams, 2016). Pada tahap seleksi, peneliti hanya menggunakan literatur yang memiliki hubungan langsung dengan tema integritas, tata kelola kampus, dan pendidikan karakter antikorupsi.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan isi literatur melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan hermeneutik. Miles dan Huberman (1994) menjelaskan bahwa analisis kualitatif mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik komparatif tematik untuk membandingkan berbagai pandangan ahli dan hasil penelitian terdahulu yang membahas strategi kampus dalam mananamkan nilai integritas dan antikorupsi.

Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif-deskriptif, yaitu menguraikan temuan dalam bentuk teks yang sistematis dan argumentatif agar mudah dipahami (Moleong, 2017). Proses penyajian data dilakukan dengan menghubungkan teori, konsep, dan praktik empiris yang ditemukan dalam literatur. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak pendidikan antikorupsi melalui pembentukan karakter, tata kelola yang bersih, dan keteladanan etis di lingkungan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Antikorupsi sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Mahasiswa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan dunia pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara konsisten menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai langkah preventif dalam membentuk karakter generasi muda (Kesuma et al., 2025). Pendidikan tinggi dianggap sebagai lembaga strategis yang mampu menanamkan nilai-nilai moral dan etika secara sistematis. Hal ini karena kampus tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menginternalisasikan norma-norma kejujuran dan tanggung jawab.

Menurut Zainudin Hasan dan Ganesya (2024) perguruan tinggi memiliki peran ganda yaitu menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual sekaligus berintegritas secara moral. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum mampu mengubah cara pandang mahasiswa terhadap praktik korupsi. Hal ini terbukti meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi teori pendidikan moral Lickona (1991) menjelaskan bahwa pembentukan karakter harus melibatkan tiga dimensi yaitu *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi perlu mengintegrasikan ketiganya agar mahasiswa tidak hanya memahami nilai kejujuran secara kognitif, tetapi juga memiliki empati moral dan perilaku nyata yang berintegritas. Dengan demikian, teori karakter Lickona mendukung pendekatan pendidikan integratif dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan kampus.

Kajian ini juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan antikorupsi sangat dipengaruhi oleh konteks institusional dan kepemimpinan moral sivitas akademika. Menurut Samion dan Thomas (2024), dosen berperan penting sebagai figur teladan yang dapat menanamkan nilai-nilai etika melalui tindakan nyata di lingkungan kampus. Keteladanan moral dari dosen dan pimpinan universitas menjadi cerminan budaya integritas yang membentuk perilaku mahasiswa.

Integritas Institusional dan Tata Kelola Etis Perguruan Tinggi

Selain aspek kurikulum dan keteladanan penelitian ini menunjukkan pentingnya tata kelola universitas yang bersih dan transparan. Dwiyanto (2021) menyatakan bahwa kampus sebagai organisasi publik harus menerapkan prinsip good governance untuk mencegah penyimpangan administratif dan akademik. Ketika lembaga pendidikan menegakkan akuntabilitas, mahasiswa belajar secara tidak langsung mengenai pentingnya integritas dalam sistem kelembagaan.

Kebijakan kampus yang mengatur tentang kejujuran akademik seperti larangan plagiarisme dan sanksi atas kecurangan ujian menjadi instrumen penting dalam menanamkan integritas (Crittenden & Hanna, 2019). Lingkungan akademik yang menegakkan disiplin etis ini menciptakan budaya kepercayaan dan tanggung jawab. Dengan demikian, tata kelola kampus bukan hanya urusan administratif, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter.

Selain itu pendekatan pembelajaran partisipatif menjadi faktor penting dalam penguatan nilai integritas. Menurut Yusar (2024), model project-based learning yang berorientasi etika publik membantu mahasiswa memahami dampak sosial dari perilaku tidak jujur. Mahasiswa tidak hanya diajak berpikir kritis terhadap isu korupsi, tetapi juga terlibat langsung dalam merancang solusi berbasis etika. Pendekatan ini sejalan dengan teori experiential learning Kolb (1984), yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial, kampus dapat menumbuhkan kesadaran moral yang lebih mendalam. Proses refleksi dari pengalaman nyata mendorong internalisasi nilai kejujuran secara berkelanjutan.

Di era digital pendidikan antikorupsi juga harus menyesuaikan diri dengan tantangan teknologi informasi. Putra dan Windah (2021) menyebut bahwa literasi digital yang berintegritas menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan informasi di kalangan mahasiswa. Penguatan etika digital dalam lingkungan akademik dapat memperluas makna integritas hingga ke ruang siber.

Dengan memanfaatkan platform digital, kampus dapat menciptakan sistem pembelajaran antikorupsi yang interaktif dan adaptif. Teknologi dapat digunakan untuk memantau kejujuran akademik serta memperkuat pengawasan transparansi kampus (Creswell, 2014). Penggunaan e-learning ethics module terbukti efektif dalam menanamkan pemahaman nilai moral kepada mahasiswa generasi milenial.

Sinergi Kearifan Lokal dan Budaya Akademik dalam Ekosistem Integritas

Dalam konteks Indonesia pendidikan antikorupsi perlu mengadaptasi nilai-nilai lokal seperti *Pi'il Pesenggiri* dalam budaya Lampung. Nilai ini menekankan harga diri, rasa malu, dan kejujuran sebagai prinsip moral (Rahayu, 2018). Integrasi kearifan lokal dalam pendidikan antikorupsi menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan sesuai dengan karakter masyarakat.

Model pendidikan berbasis kearifan lokal terbukti efektif dalam membentuk identitas moral mahasiswa (Koentjaraningrat, 2009). Hal ini karena nilai-nilai lokal memiliki kekuatan simbolik yang mampu memperkuat internalisasi moral. Dengan demikian, sinergi antara budaya lokal dan prinsip antikorupsi dapat memperluas dampak pendidikan karakter di tingkat perguruan tinggi.

Dari perspektif sosiologis kampus merupakan miniatur masyarakat yang mencerminkan dinamika sosial lebih luas. Jika integritas dapat ditegakkan di kampus, maka nilai-nilai tersebut berpotensi menyebar ke masyarakat melalui alumni yang menjadi pemimpin di berbagai sektor (Parsons, 1951). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi di kampus berfungsi sebagai investasi moral jangka panjang bagi bangsa.

Hasil kajian literatur juga memperlihatkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kampus memiliki korelasi positif dengan perilaku berintegritas (Hertanti, 2024). Melalui kegiatan kemahasiswaan dan program pengabdian masyarakat, mahasiswa belajar tentang tanggung jawab sosial dan kepemimpinan etis. Kegiatan tersebut menjadi arena pembelajaran karakter di luar ruang kelas.



Tabel 4.1 Tabel Bagan Alur Peran kampus dalam Membentuk Generasi Berintegritas dan Anti Korupsi.

Peran organisasi mahasiswa ini memperkuat gagasan Lave dan Wenger (1991) tentang *community of practice*, di mana nilai-nilai sosial terbentuk melalui interaksi dan kolaborasi. Dalam konteks ini, integritas bukan hanya diajarkan, tetapi dipraktikkan secara kolektif. Sehingga, pengalaman berorganisasi menjadi wahana internalisasi nilai antikorupsi yang efektif.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat teori pendidikan moral kontemporer yang menekankan *hidden curriculum* sebagai sarana pembentukan karakter (Jackson et al., 1993). Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran sering kali lebih efektif diajarkan melalui praktik dan budaya kampus daripada melalui materi formal. Dengan demikian, kampus dapat menjadi ekosistem moral yang membentuk kesadaran etis mahasiswa.

Dalam konteks kebijakan publik hasil kajian ini mendukung gagasan Dwiyanto (2021) tentang integritas institusional dalam tata kelola pemerintahan dan pendidikan. Ketika perguruan tinggi menegakkan transparansi dan akuntabilitas, mereka tidak hanya menciptakan budaya akademik yang sehat, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dengan begitu, kampus berperan sebagai model moral bagi sektor lain.

Secara keseluruhan temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang efektif harus bersifat multidimensi: menggabungkan pendekatan kognitif, afektif, dan konatif. Pendekatan semacam ini menciptakan keseimbangan antara pemahaman konseptual dan praktik etis (Tilaar, 2011). Hasilnya, mahasiswa tidak hanya memahami bahaya korupsi secara teoretis, tetapi juga mampu bertindak dengan integritas dalam kehidupan nyata.

Dengan memperkuat sinergi antara kurikulum, budaya akademik, dan tata kelola, perguruan tinggi dapat menjadi pusat reproduksi nilai integritas nasional. Pendidikan antikorupsi di kampus bukanlah kegiatan temporer, melainkan proses berkelanjutan yang membentuk *character-based citizenship* (Suyanto, 2020). Dengan cara ini, universitas berkontribusi langsung pada pembentukan masyarakat yang berkeadaban.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kampus memiliki peran sentral dalam pembangunan moral bangsa melalui pendidikan antikorupsi. Dengan memadukan nilai budaya lokal, prinsip tata kelola modern, dan keteladanan akademik, perguruan tinggi mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga berkomitmen terhadap integritas. Model pendidikan ini diharapkan menjadi fondasi bagi masyarakat Indonesia yang bersih, adil, dan beretika.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai fondasi pembentukan generasi berintegritas dan berkarakter antikorupsi. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran moral yang menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan akademik, organisasi kemahasiswaan, serta kurikulum yang berorientasi etika. Integrasi nilai-nilai tersebut menjadikan pendidikan tinggi sebagai wahana pembinaan karakter yang berkelanjutan bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan sosial di masyarakat.

Selain aspek pembelajaran, keteladanan moral dari dosen dan pimpinan universitas terbukti menjadi faktor penting dalam membangun budaya integritas. Kepemimpinan akademik yang etis, ditopang dengan tata kelola kampus yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, menciptakan ekosistem pendidikan yang bebas dari penyimpangan. Lingkungan akademik yang menegakkan nilai kejujuran dan etika publik ini memperkuat internalisasi perilaku antikorupsi di kalangan mahasiswa sekaligus menjadi contoh kelembagaan bagi sektor publik lainnya.

Temuan juga menunjukkan bahwa penguatan nilai integritas akan semakin efektif apabila dikontekstualisasikan dengan kearifan lokal. Nilai-nilai budaya seperti *Pi'il Pesenggiri* dalam masyarakat Lampung, yang menekankan harga diri, rasa malu, dan kejujuran, dapat diadaptasi dalam pendidikan antikorupsi untuk memperkaya dimensi moral mahasiswa. Sinergi antara budaya lokal dan nilai universal integritas menjadikan pendidikan antikorupsi di kampus lebih relevan dan membumi dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, pendidikan tinggi berperan penting sebagai pusat reproduksi nilai integritas nasional. Upaya ini menuntut kolaborasi seluruh unsur sivitas akademika—dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, serta pengelola

lembaga—untuk mengembangkan kurikulum berbasis karakter, memperkuat tata kelola etis, dan menumbuhkan budaya akademik yang bersih. Bila dilaksanakan secara konsisten, kampus tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga *benteng moral bangsa* yang melahirkan agen perubahan berjiwa bersih, adil, dan berintegritas menuju Indonesia bebas dari praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). *The craft of research* (4th ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Crittenden, W., & Hanna, R. (2019). Academic integrity and ethics in higher education. *Journal of Business Ethics*, 158(2), 345–360.
- Dwiyanto, A. (2021). *Membangun tata kelola publik yang bersih dan akuntabel*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hertanti, N. (2024). Etika publik dan karakter mahasiswa dalam kegiatan sosial kampus. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 55–70.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Laporan tahunan pendidikan karakter dan integritas nasional*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kesuma, R., Santoso, D., & Lestari, N. (2025). Character education for anti-corruption behavior in Indonesia. *Indonesian Journal of Civic Education*, 8(2), 100–112.
- Kesuma, R. P., Sakinah, A., & Marsyanda, Z. N. (2025). Peran guru sebagai garda utama penerapan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 417–426.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nida Amalia Dewi, & Dedi. (2022). Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 22–34. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3>

- Pope, J. (2022). *Confronting corruption: The elements of a national integrity system*. Berlin: Transparency International.
- Putra, P., & Windah, A. (2021). Adopsi dan implementasi kecakapan literasi informasi dan literasi digital untuk akselerasi UMKM di Indonesia pasca pandemi Covid-19. *IHRIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(2), 177–199.
- Samion, J., & Thomas, R. (2024). Educators' integrity and moral leadership in higher education. *Journal of Higher Learning Ethics*, 12(3), 201–215.
- Samion, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan antikorupsi sebagai landasan nilai integritas yang baik bagi mahasiswa. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(1), 96–100. <https://doi.org/10.5918/jurnalsostech.v4i1.1137>
- Sintia, N. K. A. (2023). Implementasi pembentukan karakter dan integritas mahasiswa melalui pendidikan antikorupsi. *TAJIDID: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin*, 3(1), 45–57.
- Suyanto, E. (2020). *Pendidikan karakter dan integritas nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- Yusar, A. (2024). Curriculum-based integrity model in higher education. *Journal of Moral Education*, 52(1), 13–28.
- Zainudin Hasan, & Daniel Junesco. (2024). Penegakan hukum dan strategi pencegahan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 89–104.
- Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan, & Arya Dwi Yuda. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas antikorupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.